BAB V

P E N U T U P

A. Kesimpulan-kesimpulan

Dari uraian di muka maka dapat disimpulkan :

1. Pertanggungjawaban pemerintah merupakan bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan Presiden selaku Mandataris Manjelis Permusyawaratan Rakyat, yaitu selaku pemegang kekuasaan dan pelaksana jalannya pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar 1945. Pertanggungjawaban tersebut dilaksanakan setiap lima tahun sekali pada saat akan mengakhiri masa jabatannya di hadapan Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat, atas kepemimpinannya selama memegang kekuasaan pemerintah dalam Nrgara Republik Indonesia.

2. Tinjauan Hukum Islam terhadap pertanggungjawaban pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintah menurut Undang-Undang Dasar 1945 menunjukkan bahwa pemerintah Negara Republik Indonesia menganut sistem pemerintahan rakyat yang dijiwai oleh nilai-nilai falsafah Pancasila yang menghendaki bahwa penyelenggaraan pemerintah haruslah didasarkan pada : keadilan, permusyawaratan, persamaan, kebebasan, dan petanggungjawaban baik terhadap rakyat maupun kepada Tuhan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yang Maha Esa. Hal ini sesuai dengan dasar-dasar penyelenggaraan pemerintahan dalam Islam.

B. Saran-saran

Dari kesimpulan-kesimpulan di atas maka penulis menyarankan :

1. Diadakan penelitian lebih lanjut tentang pertanggung jawaban pemerintah menurut Undang-Undang Dasar 1945 yang lebih sesuai dengan Syari'at Islam. Sehingga dapat diadakan penataan kembali tentang kebenaran pertanggungjawaban pemerintah yang lebih dapat dan sesuai dengan sistem pemerintah Negara Republik Indonesia, yang pada akhirnya akan dapat diketahui lebih awal apabila ada penyelewengan kekuasaan yang di lakukan pemerintah.
2. Penelitian dan penataan kembali tersebut, sesuai dengan nilai-nilai jiwa Pancasila yang terdapat pada sila pertama, yang merupakan tanggung jawab daripada pemerintah. Dengan demikian pemerintah (Presiden) sebagai pelaksana jalannya pemerintahan harus lebih dapat dan selalu memperhatikan aspirasi bebagai pihak yang tercermin dalam masyarakat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id